
**MENGUNGKAP KOMPLEKSITAS SEJARAH: KONTRIBUSI POSTRAT
DALAM MENAMBAH PEMAHAMAN TENTANG
MASA HINDIA BELANDA**

**Rosmaida Sinaga¹, Febiola Elisabeth Sembiring², Thania Paskah Margaretha Sinaga³,
Diki Abdi Nugroho⁴, Kevin Hutagalung⁵**

**rosmaidasinaga@unimed.ac.id¹, febiolaelisabeth34@gmail.com², thaniapmsinaga@gmail.com³,
dikichannelfree2@gmail.com⁴, hutagalungkevin13@gmail.com⁵**

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Sejarah Hindia Belanda merupakan periode penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Masa ini penuh dengan kompleksitas dan berbagai peristiwa penting yang membentuk Indonesia saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana postrat, sebagai sumber sejarah visual, dapat membantu dalam mengungkap kompleksitas sejarah Hindia Belanda dan menambah pemahaman kita tentang masa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis postrat-postrat dari masa Hindia Belanda. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti museum, arsip, dan koleksi pribadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa postrat merupakan sumber sejarah yang berharga untuk memahami kompleksitas sejarah Hindia Belanda. Dengan penelitian yang lebih lanjut dan penggunaan yang kritis, postrat dapat membantu kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan nuanced tentang masa ini.

Kata Kunci: Postrat, Sejarah Visual, Hindia Belanda, Kompleksitas Sejarah, Pemahaman Sejarah.

ABSTRACT

The history of the Dutch East Indies is an important period in the journey of the Indonesian nation. This period is full of complexity and various important events that shape Indonesia today. This research aims to analyze how posters, as a visual historical source, can help in uncovering the complexity of the history of the Dutch East Indies and increase our understanding of that period. This research uses qualitative methods by analyzing poststrates from the Dutch East Indies period. Data is collected from various sources, such as museums, archives and private collections. This research shows that the postrat is a valuable historical source for understanding the complexity of the history of the Dutch East Indies. With further research and critical use, poststrates can help us to gain a more complete and nuanced understanding of this period.

Keywords: *Postrate, Visual History, Dutch East Indies, Historical Complexity, Historical Understanding.*

PENDAHULUAN

Secara etimologi kata Hindia berasal dari bahasa latin, Indus. Nama asli Dutch Indies diterjemahkan oleh orang Inggris sebagai “Hindia Timur Belanda” tercatat dalam dokumen Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada awal tahun 1620-an. Selama abad ke-19, daerah jajahan dan hegemoni Belanda diperluas, mencapai batas wilayah teritorial terbesar mereka pada awal abad ke-20. Hindia Belanda adalah salah satu koloni Eropa yang paling berharga dibawah kekuasaan Imperium Belanda, dan berkontribusi pada keunggulan global Belanda dalam perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi. Pemerintah belanda mulai melaksanakan ekspedisi militer beberapa wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Pulau Lombok. Meskipun pemberontakan di Indonesia pecah, kekuasaan pemerintahan kolonial diperluas ke seluruh wilayah nusantara dari tahun 1901 sehingga 1910 dan kontrol atas wilayah tersebut juga diambil dari para penguasa lokal yang tersisa. Ekspedisi militer diwilayah Sulawesi terlaksana pada tahun 1905 hingga 1906. Pada tahun 1901, Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut sebagai Politik Etis, dimana pemerintah kolonial memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Langkah-langkah baru lainnya di bawah kebijakan tersebut mencakup program irigasi, transmigrasi, komunikasi, mitigasi banjir, industrialisasi dan perlindungan industri pribumi. Industrialisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap mayoritas penduduk Indonesia dan Indonesia tetap saja merupakan koloni yang bergantung pada pertanian. Berdasarkan rancangan Idenburg kemudian diterima oleh parlemen Belanda dan menjadi UU, yang dikenal dengan sebutan Desentralisasi tahun 1903, adapun garis besar butir-butir UU Desentralisasi adalah sebagai berikut: Kesatuan hukum (Rechtsgemeenschappen) teritorial yang baru dapat dibentuk di samping Hindia Belanda dan Desa sebagai kesatuan hukum. Kesatuan hukum baru ini dinamakan resor dewan lokal (ressorten van locale raden) atau Swapraja lokal (locale zelfbesturen) atau “local self government”, sekarang dikenal sebagai daerah Otonom.

Kerajaan Bantayan sebagai salah satu kerajaan yang terletak dipesisir selatan juga ditemukan fakta sejarah melalui informasi seorang pujangga Keraton Majapahit, dalam karya kesustranya yang termasyur Kitab Negarakertagama jaman Gajah Mada sekitar abad XIV, ditemukan kata Bantayan pada pupuh 13-14. Adapun beberapa patah kalimat yang menyebutkan tentang negeri- negeri di Sulawesi Selatan yang menjadi daerah taklukan Kerajaan Majapahit, sebagai berikut;

“Pulau Gurun, yang juga biasa tersebut Lombok Merah dengan daerah makmur Sasak diperintahkan seluruhnya. Bantayan di wilayah Bantayan beserta kota Luwuk sampai Udamakatraya dan pulau-pulau lainnya tunduk. Tersebut pula pulau-pulau Makassar, Buton, Benggawai, Kunir, Galian serta Salayar, Sumba atau pulau Maluku, Wanin, Seram, Timor, dan beberapa lagi pulau-pulau lainnya”. Maksud dari kutipan beberpa patah kalimat tersebut adalah seluruh daerah Sulawesi menjadi daerah ke VI Kerajaan Majapahit, yaitu Bantayan (Bantaeng). Luwuk (Luwu), Udamakatraya (Talaud), Makassar, Butun (Buton), Banggawi (Banggai), Kunir (Pulau Kunyit), Salayar (Selayar), Solot (Solor), dan seterusnya. Sumber ini dianggap sebagai sumber tua tentang Kerajaan Bantayan sebagai sebuah negeri (Fahmi, 2013: 4). Sumber di atas juga dipertegas, pernyataan Yamin dalam Atlas Sejarah, Halaman Tanah Air Bangsa Indonesia yang ditulis Prapanca sekitar abad XIV (1365) nama-nama negeri yang tersebut dalam peta Sulawesi Selatan salah satunya adalah Bantayan dimjazirah Selatan Sulawesi Selatan. Pada halaman lain buku peta tersebut, yang melukiskan tenggelamnya Sriwijaya, Singosari sekitar abad XIII (1222- 1293), hanya tersebut Bantayan di Jazirah Selatan Sulawesi Selatan, sebagai daerah Singosari di bawah Kertanegara abad XIII (1254-1292) (Yamin, 1956: 12-13).

Dasar-dasar pelaksanaan pemerintahan Hindia Belanda bersumber pada Undang-Undang Dasar (Grondwet) Negeri Belanda tahun 1922, yang kemudian berturut-turut

diperbaiki melalui amandemen-amandemen 1929, 1935 dan terakhir 1938. Menurut Undang-Undang tersebut Hindia Belanda menjadi bagian dari Kerajaan Belanda yang mencakup daerah-daerah Negeri Belanda, Hindia Belanda, Suriname dan Curacao (Daliman: 2017,81). Pembaharuan sistem dan struktur pemerintahan Hindia Belanda selalu dilakukan oleh pemerintah, namun dalam prakteknya juga selalu mengalami kendala maka perubahan yang terjadi bersifat persuasif. Pada masa ini ditandai dengan terjadinya perubahan-perubahan besar dan dahsyat. Kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah ini, dahulu merupakan kerajaan sekutu (*Bondgenootchappelijke landen*), kini dihapuskan dan dijadikan wilayah pemerintahan dan kekuasaan langsung Pemerintahan Hindia Belanda. Bentuk-bentuk pemerintahan di wilayah itu yang bercorak kerajaan dan konfederasi sebagai satu kesatuan dari beberapa wilayah kesatuan kecil. Maupun dari suatu kelompok kaum yang berpemerintahan sendiri ditiadakan.

Meskipun demikian, Karaeng (raja) tetap diakui oleh Belanda sebagai kepala pemerintahan dalam wilayah dan digelar Regent van Bonthain. Ia diakui sebagai kepala adat di samping pemerintahan Belanda selaku penguasa tertinggi di wilayah Onderafdeling ini. Bantaeng pasca ekspedisi militer Belanda pada tahun 1905, juga telah mengalami berbagai macam perubahan dalam politik pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Pada tanggal 8 Maret 1942, pihak Belanda di Jawa menyerah dan Gubernur Jendral Hindia Belanda Tjarda Van Starckenborgh Stachouwer ditawan pihak Jepang. Dengan demikian, bukan saja de facto, melainkan secara de jure, seluruh wilayah bekas Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang. Maka berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia termasuk di Onderafdeling Bonthain. Berangkat dari uraian di atas, periodisasi sistem pemerintahan di Bantaeng terbagi kedalam dua fase yaitu periode To Manurung, sebagai peletak dasar sistem pemerintahan tradisional, periode Kolonial. maka pada penelitian tesis ini akan mencoba meneliti tentang proses peralihan dari sistem pemerintahan tradisional ke sistem pemerintahan kolonial, sistem administrasi pemerintahan kolonial dan pengaruh sistem pemerintahan kolonial terhadap aktivitas politik dan perekonomian di Onderafdeling Bonthain 1905-1942.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotika Roland Barthes. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam makna dan pesan yang terkandung dalam postrat sebagai sumber sejarah visual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jejak Postrad Di Hindia Belanda: Pada Buku-Buku Harian

Pada masa Hindia Belanda, penulisan sejarah Hindia Belanda yang tertua dapat disebut pada buku-buku harian kapal yang pada zaman keemasan dicetak dalam jumlah yang besar dan banyak dibaca. Kini buku-buku tersebut diterbitkan kembali dengan lengkap oleh Van Linschoten Vereeniging. Suatu kisah umum yang pertama tentang kegiatan-kegiatan VOC pada masa permulaan terdapat dalam buku *Begin ende voortganck van de vereenigde Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie*. Walaupun pelajar-pelajar ke Hindia (*Oostinjevaarders*) tidak datang untuk belajar melainkan untuk berdagang, sebagian besar dari mereka tidak bisa menghindarkan diri dari mencatat beberapa keterangan tentang berbagai hal yang aneh yang mereka lihat dan dengar. Sangatlah menarik perhatian betapa ekstensifnya surat-surat resmi kompeni dan penuh dengan keterangan-keterangan etnografis dan historis. Tetapi sayang sekali dokumen ini kebanyakan berada dalam arsip. Hanya beberapa dokumen saja yang dikeluarkan dalam zaman *Campagnie* itu juga seperti buku Van Goen tentang pulau Jawa. Buku yang pertama dalam jenisnya ini justru menceritakan

pegawai kompeni yang sejati, penuh perhatian pada masyarakat pribumi yang menakjubkan.

Dalam konteks historiografi kolonial pada masa Hindia Belanda, terdapat ciri-ciri yang membedakannya dari historiografi pada periode lainnya. Salah satu ciri tersebut adalah fokus historiografi kolonial yang lebih pada bangsa Belanda atau Eropa, yang menghasilkan karya-karya seperti *Indonesian Trade and Society* karangan Y.C. Van Leur, *Indonesian Sociological Studies* karangan Schrieke, dan *Indonesian Society in Transition* karangan Wertheim. Historiografi kolonial cenderung menekankan peranan bangsa Belanda dalam konteks kolonialisme dan mengabaikan peristiwa serta kehidupan rakyat Indonesia di masa penjajahan Belanda.

Perkembangan Postrad Di Masa Hindia Belanda

Di masa Hindia Belanda, kemajuan pos atau sistem pos perdagangan yang disebut sebagai "postrad" menjadi sangat signifikan. Postrad merupakan sistem transportasi dan komunikasi yang terdiri dari jaringan pos yang merentang dari satu tempat ke tempat lain, memfasilitasi perdagangan, administrasi kolonial, dan komunikasi antara Belanda dan wilayah jajahannya di Hindia Belanda (kini Indonesia).

Sistem postrad ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menyederhanakan pengiriman surat, barang dagangan, dan informasi antar daerah, serta memperluas kendali administratif mereka di wilayah tersebut. Postrad terdiri dari jalur jalan yang terjaga dengan baik, pos-pos kecil sebagai stasiun pertukaran, dan kuda atau kendaraan lainnya untuk mengangkut surat dan barang.

Postrad memiliki peran yang penting dalam memperlancar perdagangan dan administrasi kolonial di Hindia Belanda. Namun, sebaliknya, postrad juga melambangkan dominasi dan eksploitasi kolonial Belanda terhadap penduduk pribumi, karena sistem ini lebih menguntungkan pemerintah kolonial daripada masyarakat lokal.

Manfaat-Manfaat Postrad Masa Hindia Belanda

Postrad, singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu, memberikan berbagai keuntungan di masa pemerintahan Hindia Belanda: **Administrasi Efisien:** Postrad menyediakan layanan administrasi seperti pengiriman surat dan paket, serta pembayaran tagihan, yang membantu masyarakat dalam kebutuhan komunikasi dan administrasi. **Penyebaran Informasi Cepat:** Melalui postrad, informasi dapat tersebar dengan cepat dan efisien, baik dalam bentuk surat kabar, pamflet, maupun pengumuman resmi pemerintah, memfasilitasi komunikasi antarwilayah. **ostrad (Pos Telegraf Radiotelegraf Dienst)** atau layanan pos, telegraf, dan radiotelegraf memiliki beberapa manfaat yang penting:

Komunikasi Jarak Jauh: Postrad memungkinkan komunikasi jarak jauh antara berbagai wilayah di Hindia Belanda, memfasilitasi pertukaran informasi penting, komunikasi bisnis, dan komunikasi pribadi.

Pertukaran Bisnis: Layanan postrad memungkinkan perusahaan-perusahaan dan pedagang untuk melakukan pertukaran informasi dan pesanan barang secara efisien, mempercepat aliran perdagangan dan ekonomi di Hindia Belanda.

Pertahanan dan Keamanan: Postrad juga memiliki peran penting dalam pertahanan dan keamanan kolonial. Informasi militer dan intelijen dapat disampaikan dengan cepat melalui jaringan postrad untuk tujuan keamanan nasional.

Kehidupan Sosial: Layanan postrad membantu dalam mempererat hubungan sosial antara keluarga dan teman-teman yang terpisah oleh jarak, sehingga memungkinkan pertukaran surat dan komunikasi pribadi.

Administrasi Kolonial: Postrad mendukung administrasi kolonial Belanda dalam pengelolaan berbagai aspek pemerintahan, termasuk pengiriman instruksi, laporan, dan komunikasi resmi antara pemerintah pusat dan daerah-daerah di Hindia Belanda.

Meskipun memiliki manfaat yang signifikan, penting untuk diingat bahwa postrad di masa Hindia Belanda juga menjadi alat untuk mengawasi dan mengendalikan penduduk pribumi serta mendukung kepentingan kolonial Belanda.

Keuntungan Dan Kerugian Pribumi Dengan Adanya Postrad Di Masa Hindia Belanda

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat pribumi akibat adopsi sistem postrad pada periode Hindia Belanda adalah peningkatan signifikan dalam aspek komunikasi dan interkoneksi antarwilayah di wilayah kepulauan tersebut

Pengendalian Otoritarian oleh Pemerintah Belanda: Postrad, sebagai strategi dalam administrasi kolonial, memberikan akses terbatas kepada pribumi dalam struktur pemerintahan, namun kekuasaan sebenarnya tetap melekat pada pemerintah kolonial Belanda.

KESIMPULAN

Hindia Belanda merupakan sebuah koloni yang sangat berharga bagi Belanda, terutama dalam perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi. Selama periode Hindia Belanda, terjadi proses peralihan dari sistem pemerintahan tradisional ke sistem pemerintahan kolonial, yang mengakibatkan perubahan besar dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah tersebut. Salah satu aspek penting dari pemerintahan kolonial adalah pendirian sistem postrad, yang memiliki manfaat signifikan dalam administrasi, komunikasi, dan pertahanan kolonial, meskipun juga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan penduduk pribumi dan mendukung kepentingan kolonial Belanda. Meskipun ada manfaat bagi masyarakat pribumi, seperti peningkatan dalam komunikasi dan interkoneksi, tetapi kekuasaan sebenarnya tetap berada di tangan pemerintah kolonial Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Rahmad. 2016. *Historiografi Kolonial Pada Masa Hindia Belanda (1816-1942)*. Idsejarah. Diakses pada 16 Januari 2016 dari <https://idsejarah.net/2016/01/historiografi-kolonial-pada-masa-hindia.html>.
- Aristotle (Penulis), John Warrington (editor dan translator). *Politics and Athenian Constitution*. London: J.M.Dent, 1984.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Asshidique, Jimly, "Lembaga Perwakilan dan Permusyawaratan Rakyat Tingkat Pusat." http://www.jimly.com/makalah/namafile/40/Trikameralisme_DPD.doc, (diakses 21 November 2018).